

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keadaan kemiskinan tidak terjadi karena yang bersangkutan menginginkannya. Ketika seseorang tidak mampu menghidupi dirinya dan keluarganya, dia berada dalam kemiskinan. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan uang untuk membayar kebutuhan seperti makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi, yang dapat didefinisikan sebagai kebutuhan hidup dasar. Untuk mengembangkan masyarakat yang adil dan sukses, suatu negara harus menaklukkan kemiskinan. Untuk mengategorikan individu atau kelompok sebagai miskin, gunakan tolok ukur (misalnya tingkat pendapatan setiap rumah tangga dan kebutuhan relatif) sebagai panduan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan orang miskin tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, atau layanan sosial lainnya yang memadai karena hal ini. Pengentasan kemiskinan hendaknya tidak hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan material dan sosial politik, tetapi juga pada pengentasan kebutuhan lainnya.

Kepadatan penduduk Indonesia sangat tinggi. Selain itu, kemiskinan telah menjadi masalah dunia yang mempengaruhi semua negara. Tidak ada solusi sederhana untuk masalah kemiskinan karena telah berkembang menjadi rintangan yang kompleks. Karena sebagian besar orang Indonesia miskin, tingkat kemiskinan negara ini terus meningkat. Akibatnya, Indonesia dihadapkan pada banyak masalah kompleks, termasuk tingkat kejahatan yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesehatan yang buruk. Dengan kekuasaan datang tanggung jawab, dan pemerintah berhak berperan dalam menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pemerintah yang paling efektif dalam memerangi kemiskinan (PKH). Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Badan Pusat Statistik Suhariyanto (2016). Penurunan angka kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, termasuk pertumbuhan ekonomi negara yang pesat. (Rastra) atau yang saat ini disebut dengan bantuan kemanusiaan. Program Keluarga Harapan dan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berdampak baik terhadap jumlah penduduk miskin di masyarakat kita (kemosos.go.id, 2020).

Program Keluarga Harapan didirikan pada tahun 2007 sebagai hasil dari inisiatif pemerintah ini. *Conditional Cash Transfer* (CCT) atau transfer tunai bersyarat telah diadopsi dan terbukti berhasil di banyak negara. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukanlah kelanjutan dari PKH. Hal ini dimaksudkan untuk membantu keluarga kurang mampu mempertahankan daya beli ketika pemerintah menyesuaikan biaya bensin. Tujuan PKH adalah untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Untuk keluarga kurang beruntung jangka panjang, program yang sebanding telah terbukti sangat berguna.

Permensos No.1 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “*Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, hingga kemudian ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH*”. Bukan kali pertama KPM PKH mendapat telepon dari Kemensos, namun baru pertama kali menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah PKH. Meski demikian, mentalitas masyarakat yang menunggu bantuan telah berubah dengan adanya program ini. Dengan kata lain, keberadaan PKH

memaksa masyarakat menjadi tergantung padanya (bergantung pada kehidupan mereka). Medan Johor, Daerah Medan Johor Kota Medan pada khususnya. Gedung Johor, Desa Durian, Pangkalan Mansyur dan Kwala Bekala merupakan enam kecamatan yang ada di kabupaten Medan Johor,

Menurut Rahayu, (2012:128) Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga sangat miskin (RTSM) diberikan uang tunai berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk memenuhi tanggung jawabnya. Para ibu diberdayakan dan anak-anaknya didorong untuk melanjutkan pendidikan melalui upaya PKH untuk meningkatkan kualitas sumber daya mereka. Gunakan data BPS untuk mengidentifikasi dan menjangkau audiens target Anda. Sebaliknya, para peserta KPM diberi nasehat bagaimana bersikap baik kepada para lansia yang membutuhkan perawatan atau pendampingan. Bantuan sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, tetapi sangat penting bagi anggota yang paling rentan.

Ketika tim KPM memimpin perubahan dalam pola pikir mereka, mereka menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bantuan tunai diberikan kepada keluarga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu di bawah Program Keluarga Harapan (PKH). Kehidupan masyarakat akan meningkat jika mereka cenderung tidak miskin dan mata rantai kemiskinan terputus, dan kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peserta atau komponen PKH (Program Keluarga Harapan) harus memenuhi persyaratan dan komitmen PKH (yaitu pendidikan dan kesehatan). Ibu hamil, ibu nifas, balita, dan anak prasekolah merupakan bagian dari kelompok sasaran PKH yang meliputi keluarga miskin (KM) dan anak usia 7 sampai dengan 21 tahun (setara SD, setingkat SMP, dan sederajat SMA) dimana hal tersebut terdapat permasalahan yakni pada kurangnya pendidikan.

Sejak tahun 2008, Proyek Keluarga Harapan (PKH) telah dilakukan di Medan, Tapanuli Tengah, dan Nias, Sumatera Utara. Setelah Jakarta dan Surabaya, Medan adalah kota terbesar ketiga di Indonesia dengan 183.000 penduduk miskin dari 21 provinsi berbeda.

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Medan

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	2019	2018	2017
Kota Medan	183,79	186,45	204,00

Sumber : BPS Kota Medan (diakses pada 11 Maret 2021)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin semakin meningkat dari tahun ke tahun . Dalam rangka meminimalisir jumlah penduduk miskin di Kota Medan, pemerintah menyediakan Program Keluarga Harapan . Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari 3 kategori yaitu anak-anak di usia sekolah, ibu hamil atau nifas, dan lanjut usia (lansia). Proses pendaftaran PKH yaitu dengan memasukkan nama di Basis Data Terpadu Keluarga Miskin yang ada di Dinas Sosial , lalu Kementerian Sosial yang akan menyeleksi siapa saja yang nantinya akan menjadi peserta penerima PKH . Peserta yang sudah divalidasi akan diserahkan ke masing-masing UPPKH pusat maupun daerah. UPPKH adalah unit pengelola PKH yang dibentuk pada tingkat pusat, daerah dan kecamatan. Jumlah penduduk miskin kota Medan adalah sebanyak 183.790 jiwa , sementara jumlah penerima PKH di Kota Medan yaitu 59.000 jiwa (dikutip dari Bapak Deddy Pardede M.AP selaku Kepala Koordinator PKH Kota Medan, 22 Maret 2021) hal ini menyebabkan masih banyaknya penduduk miskin yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut .

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Medan maka Pemerintah Pusat membuat keputusan yakni Dinas Sosial Kota Medan melalui UPPKH Kota Medan menjalankan tugasnya dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan KPM PKH Kota Medan yang diatur dalam SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 38/34/KP.03/12021 terkait Pengangkatan Pendamping Sosial 2021 yang ditugaskan dalam melakukan pemberdayaan terhadap KPM PKH.

Seorang koordinator PKH akan ditugaskan untuk setiap peserta PKH. Pendamping PPH adalah pekerja sosial yang telah diseleksi dan dilatih oleh UPPKH pusat melalui proses seleksi, melakukan kegiatan pembinaan bagi penerima rencana KPM, dan mendukung kelancaran pelaksanaan PKH. Untuk menjalankan strateginya, PKH mengandalkan bantuan seorang pendamping. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pendampingan dalam memperoleh haknya sebagai peserta PKH dan hak-hak lain yang terkait dengan program tambahan. Misalnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan hak tersebut melalui program seperti RASKIN dan KIP/KIS/PSKS/KUBE/UEP/Perumahan yang layak huni, misalnya.

Misi UPPKH pusat/daerah juga perlu mendeteksi dan melaporkan segala kesulitan dalam pelaksanaan PKH, serta melakukan tindak lanjut penanganan dan penyelesaian dalam waktu singkat oleh Koordinator PKH. Pengetahuan Profesional dan Kemanusiaan (PKH).

Peserta PKH yang memiliki anak berusia antara 7 hingga 15 tahun wajib memenuhi kriteria pendidikan. Harus ada minimal 85 persen hari sekolah dalam sebulan yang didedikasikan untuk mengajar bagi anak peserta PKH untuk didaftarkan pada satuan pendidikan (SD atau MI; SDLB; SDLB; SMP/Paket A/MTs/SMPLB/SMP/ MTs Terbuka atau Paket B).

Tujuan akhir Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi jumlah pekerja di bawah umur di Indonesia dengan meningkatkan angka partisipasi anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Dengan mendorong anak-anak dari rumah tangga sangat miskin untuk bersekolah dan mendorong mereka untuk menepati janji mereka untuk hadir secara teratur selama proses pembelajaran, "Program Keluarga Harapan" di industri pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan ini. Tidak ada masalah dengan program ini, tapi akan selalu ada tantangan. Salah satunya adalah keakuratan informasi kelayakan peserta Program Keluarga Harapan.

Data Penerima PKH Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2

Data Penerima PKH Kota Medan 2020

No.	Kecamatan	Jumlah KPM
1.	Medan Amplas	2229
2.	Medan Area	1074
3.	Medan Barat	1407
4.	Medan Baru	441
5.	Medan Belawan	7482
6.	Medan Deli	4869
7.	Medan Denai	2908
8.	Medan Helvetia	1697
9.	Medan Johor	2717
10.	Medan Kota	1048
11.	Medan Labuhan	5209
12.	Medan Maimun	1209
13.	Medan Marelan	5645

14.	Medan Perjuangan	1428
15.	Medan Petisah	612
16.	Medan Polonia	1164
17.	Medan Selayang	1708
18.	Medan Sunggal	1828
19.	Medan Tembung	2295
20.	Medan Timur	1436
21.	Medan Tuntungan	1429

Sumber : Dinas Sosial Kota Medan (diakses pada 11 Maret 2021)

Pelaksanaan PKH di Kota Medan sudah ada di 21 Kecamatan salah satunya Kecamatan Medan Johor .Data tersebut menunjukkan bahwa Kota Medan memiliki jumlah KPM yang cukup besar di setiap kecamatan yang ada di Medan. Kecamatan Medan Johor memiliki 4 kelurahan , yaitu Kelurahan Kwala Bekala, Pangkalan Mansur, Kedai Durian, dan Gedung Johor Medan Johor merupakan kecamatan penerima KPM cukup banyak dengan jumlah 2.717 kelompok penerima manfaat .

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Medan Johor karena berdasarkan wawancara *Pra Research* dengan Pendamping PKH di Medan Johor, tepatnya di Kelurahan Kwala Bekala penulis menemukan beberapa KPM yang memiliki komponen anak dalam usia pendidikan , namun tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolahnya. Padahal salah satu komitmen dalam pelaksanaan PKH di bidang pendidikan, pesertawajib mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan kehadiran minimal 85%, selain itu para orangtua wajib mengalokasikan bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan sekolah anaknya. Pada kenyataannya masih banyak KPM yang belum mengalokasikan bantuan tersebut dengan tepat. Hal itu disebabkan oleh berbagai

faktor , salah satunya keterbatasan pendapatan utama yg diperoleh oleh KPM sehingga harus menggunakan bantuan tersebut demi kebutuhan lain yang lebih terdesak.

Personil jelas diperlukan untuk mendorong pelaksanaan PKH agar berhasil. Mediator PKH adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa misi atau tujuan PKH saat ini dilakukan secara efisien. Orang ini dipekerjakan dan dikontrak oleh Kementerian Sosial untuk menjalankan tugas pendampingan PKH. Seberapa baik PKH dilaksanakan dan peran fasilitator berpengaruh pada hasilnya.

Menurut Banks (2003, hlm. 56) : *“Pada beberapa program sosial di negara-negara maju, keberadaan pendamping berhasil membantu meningkatkan dampak serta efektivitas program melalui intervensi, pemberian informasi serta pemberdayaan kepada penerima bantuan. Pendamping program berhasil menjembatani kebutuhan kelompok penerima bantuan program sosial tersebut”*.

Tugas koordinator adalah mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Tanggung jawab utama koordinator PKH adalah membantu peserta RTSM/KSM PKH dalam mencapai tujuannya. Selain tanggung jawab ini, asisten proyek membantu memberdayakan mereka yang kurang mampu, yang merupakan penerima manfaat proyek.

Pendamping PKH berperan penting dalam menentukan keberhasilan program perlindungan sosial yang menggunakan teknik bansos. Penerima PKH dihubungi langsung oleh koordinator melalui berbagai peran yang mereka mainkan, terutama dari pertemuan pertama hingga proses pengaduan (Kemensos, 2011: 17).

Ritonga (2009 Menurut beberapa parpol, rencana pengentasan kemiskinan PKH sebelumnya tanpa sistem bansos dinyatakan tidak efektif karena biasanya hanya terfokus



pada penyaluran bansos tanpa integrasi, tanpa pemberdayaan, dan bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kwala Bekala di kecamatan Medan Johor Medan terkait dengan berbagai kesulitan. Bantuan ini belum diberikan kepada semua orang yang memintanya menurut survei pendahuluan oleh para akademisi, bahkan ketika warga ini diperhitungkan. Ada persentase yang tinggi dari pengguna PKH yang tidak bersekolah, dan rencana tersebut mengamanatkan agar anak-anak mendaftar di sekolah atau menyelesaikan pekerjaan yang tidak terjawab dalam paket A, B, atau C, tergantung pada tingkat kelas mereka (setara dengan sekolah menengah). Mereka adalah profesional sosial yang berhubungan erat dengan KPM setiap hari. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, koordinator PKH harus berperan aktif dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan organisasi dan/atau masyarakat eksternal. Untuk itulah penelitian ini dilakukan terlebih dahulu. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena hal ini “*Bagaimana Peran Pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan di Kecamatan Medan Johor*”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Adanya dugaan belum semua keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu menjadi Keluarga Penerima Manfaat.
2. Dugaan ditemukannya peran pendamping belum maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk mendampingi dan mengarahkan Keluarga Penerima Manfaat yang malah menggunakan bantuan Pendidikan anaknya untuk kepentingan lain tidak sesuai dengan alokasi bantuan yang seharusnya.
3. Dugaan ditemukannya Keluarga Penerima Manfaat yang dianggap sudah tidak memiliki komponen untuk menerima bantuan PKH namun belum mengeluarkan diri dari PKH.

4. Dugaan bahwa Dinas Sosial belum konsisten menjalankan tugas dalam memantau jalannya Program Keluarga Harapan di seluruh lokasi pelaksanaan program.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Pendamping dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan di Kecamatan Medan Johor Kota Medan ?
2. Apa faktor penghambat dalam menjalankan peran pendamping dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Medan Johor Kota Medan ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis bagaimana Peran Pendamping dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan di Kecamatan Medan Johor Kota Medan.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam melaksanakan Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan di Kecamatan Medan Johor Kota Medan.

### **1.4 Kegunaan Teoritis**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai bagaimana Peran Pendamping dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan di Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan memberikan informasi untuk perkembangan Ilmu Administrasi Publik.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Peneliti, yang dilakukan dapat menambah mengetahui mengenai bagaimana Peran Pendamping dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan di Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan memberikan

informasi untuk perkembangan Ilmu Administrasi Publik.

2. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan referensi penelitian ilmiah selanjutnya.
3. Bagi Dinas Sosial dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Medan, penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Kota Medan dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Medan sehingga kekurangan- kekurangan yang ada diharapkan dapat diperbarui dan dapat memberikan saran serta menjadi acuan langkah penyempurnaan terhadap kegiatan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Johor Kota Medan.
4. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana Peran Pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan Kecamatan Medan Johor untuk meningkatkan Pendidikan dan menekan angka kemiskinan.

## **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Adapun Penelitian peran pendamping dalam pelaksanaan PKH sudah pernah diteliti oleh peneliti lain, walaupun memiliki topik yang sama, namun terdapat perbedaan antara masalah penulis dengan penulis lainnya.

Dyah Ayu Virgoreta (2012) dengan judul penelitian “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)*”. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ternyata belum semua masyarakat yang mendapatkannya, termasuk mendapatkan pendidikan yang wajib. Seharusnya dengan mendapatkan bantuan program PKH tersebut, masyarakat Keluarga

Miskin akan mendapatkan hidup yang layak , melainkan masih ada terdapat kendala maupun kekurangan dalam pelaksanaan Program PKH.

Rina Gaguk Ika Prayitna (2018) dengan judul penelitian “*Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan di Kabupaten Ponorogo*”. Penelitian ini menunjukkan Peserta PKH belum mampu mempengaruhi pranata masyarakat seperti lembaga pendidikan dan kesehatan, hal ini karena masih lemahnya nilai tawar mereka terhadap kekuasaan.ada tingkat kesadaran ditemukan hambatan yaitu belum dilaksanakan strategi FDS secara menyeluruh. Sedangkan tidak adanya pemberdayaan pada tingkat kontrol karena pemberdayaan pada tingkat ini tidak menjadi tujuan PKH.

Ganang Dibya Angkasa(2018) dengan judul penelitian “*Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Desa Kedungrojo*”. Dalam proses pelaksanaan PKH di Indonesia, salah satu desa dengan penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tuban adalah Desa Kedungrejo , namun di desa tersebut penerima program PKH masih tergolong sedikit dibandingkan dengan desa lainnya.Hal ini dikarenakan belum meratanya pembagian bantuan program keluarga harapan. Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan PKH bagi masyarakat dan melakukan pemerataan bagi warga yang sama-sama tergolong miskin, agar masyarakat dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Suparno (2017) dengan judul penelitian “*Implementasi Hak Warga Negara melalui Penanggulangan kemiskinan berspektif Program Keluarga Harapan terhadap Motivasi Belajar Anak Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Sintang*”. Menurut penelitian ini, Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Xintang masih belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Akibatnya, banyak anggota RTSM/KSM yang masih

hidup dalam kondisi rapuh, tidak berdaya, dan kurang pengetahuan, tanpa tempat yang bisa disebut rumah. Sebagai hasil dari dukungan ini, pemerintah daerah akan memiliki pendanaan yang sesuai dan dapat berpartisipasi dalam inisiatif tersebut. Sumber daya tambahan harus dikembangkan untuk membantu peserta PKH yang sekarang hidup di bawah garis kemiskinan untuk hidup mandiri dan membuka lapangan kerja sehingga mereka tidak merasa bergantung pada pemerintah.

Nanda Nadilia Putri (2015) dengan judul penelitian "*Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik*". Sumber Daya Manusia yang kurang dalam menjadi pendamping pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH). Seharusnya Pemerintah menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih banyak lagi, untuk membantu pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gresik.

Rahasia Meissel Anneke (2018) dengan judul penelitian "*Efektivitas Ketepatan Sasaran dalam Penyaluran PKH Keluarga Petani Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken Kota Manado*". Penelitian ini melihat seberapa baik Program Keluarga Harapan (PKH) didistribusikan di Desa Melas, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Sebagai peserta binaan PKH, peserta harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk memenuhi janji dan kewajibannya, dan keuntungan yang diperoleh peserta PKH harus dimanfaatkan dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan khusus mereka.

Habibulah (2011) dengan judul penelitian "*Peran Pendamping pada Program Keluarga Harapan*". Untuk memastikan keberhasilan rencana, disebutkan bahwa peran fasilitator sangat penting. Akibatnya, fasilitator PKH harus mendapatkan pelatihan khusus atau diberikan materi yang menguraikan tanggung jawab posisi dan kualifikasi yang diperlukan untuk keberhasilan dalam kegiatan bimbingan teknis. Promotor gen PKH. Tugas

Fasilitator PKH tidak terbatas pada satu jenis; melainkan, berbagai peran sering muncul dan harus dilakukan pada waktu dan tempat yang sama.

R.A. Febrianto, dkk (2020) dengan judul penelitian “*Pengaruh Peran Pendamping dan Motivasi Belajar terhadap Perubahan Perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)*”. Pelaksanaan pengelolaan keuangan KPM PKH Kabupaten Suruh dipengaruhi secara positif oleh fungsi pembimbing, serta oleh motivasi belajar peserta didik. Selain variabel peran teman sebaya dan motivasi belajar, terdapat faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan rumah tangga di Kecamatan Suruh yang ingin merencanakan Keluarga Manfaat (KPM). Kegiatan KPM Family Benefit Plan (KFP) Keluarga Harapan dalam Pengelolaan Keuangan Kabupaten Suruh. Dengan demikian, semakin seseorang dipengaruhi oleh keputusan keuangan rekan-rekan mereka, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengubah kebiasaan keuangan mereka sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparno yang berjudul “*Implementasi Hak Warga Negara melalui Penanggulangan kemiskinan berspektif Program Keluarga Harapan terhadap Motivasi Belajar Anak Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Sintang*”. Penelitian yang dilakukan oleh Suparno ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu ingin mengetahui pelaksanaan dari program keluarga harapan dari segi penerima manfaatnya di bidang pendidikan. Letak perbedaan dengan penelitian penulis adalah dari Peran Pendamping PKH dalam mendorong KPM di Bidang Pendidikan terhadap penerima program keluarga harapan tersebut, selain itu letak lokus yang juga berbeda.

Penelitian penulis disini mengenai peran pendamping PKH di bidang Pendidikan di Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu ialah berfokus pada peran pendamping menurut teori *community worker* atau pekerja sosial

menurut Ife. Teori ini sesuai dengan pendamping PKH yang merupakan pekerjaan sosial di bawah naungan Kementerian Sosial RI. Teori tersebut mencakup Peran Fasilitatif, Edukasional, Keterampilan Perwakilan dan Keterampilan Teknis. Hal itu mendukung penulis untuk meneliti tentang Peran Pendamping yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya di Bidang Pendidikan di Kecamatan Medan Johor.

### **1.5.2 Administrasi Publik**

Meskipun administrasi publik telah ada sejak lama, para profesional di Indonesia telah mengganti istilah administrasi publik dari frasa administrasi negara,

Nigro dan Nigro (dalam Pasolong, 2014 : 8) telah memberikan sebuah definisi yakni :

“Administrasi Publik adalah (1) Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, (2) Meliputi tiga cabang pemerintahan : eksekutif , legislatif dan serta hubungan di antara mereka, (3) Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik , (4) Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat , (5) Di dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan”.

Administrasi publik, berbeda dengan administrasi individu, menekankan kerja tim di antara dua orang atau lebih yang bekerja di lingkungan pemerintahan, seperti yang dikemukakan oleh Nigro & Nigro. Administrasi publik, menurut Dimock dan Koenig (dalam Pasolong, 2014: 7), adalah pelaksanaan kekuasaan politik pemerintah.

Sekelompok orang atau lembaga yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pemerintah dapat dianggap terlibat dalam administrasi publik, berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh sejumlah ahli.

Ada beberapa pergeseran paradigma di bidang administrasi publik, menurut Nicholas Henry, yang menulis tentang ini dalam jurnalnya "Public Administration Review". Dimana hal tersebut antara lain:

***Paradigma 1: The Politics-Administration Dichotomy (1900-1927)***

Dengan tujuan memisahkan politik dari administrasi, Woodrow Wilson dan Frank Goodnow menciptakan paradigma ini. Mereka percaya bahwa administrasi dan politik harus dipisahkan. Di pemerintahan AS saat ini, masih banyak skema predator dan jaringan sponsor dalam hal mempekerjakan pekerja sipil. Menurut definisi, politik berfungsi sebagai prinsip panduan untuk semua yang dilakukan oleh administrasi. Mustahil bagi pemerintah yang tidak memiliki kepentingan politik untuk mengajukan pemerintahan yang netral.

Dengan menggunakan dualitas ini, elit politik dapat mempekerjakan pejabat publik untuk keuntungan mereka dengan menempatkan mereka pada posisi yang tidak netral dan dengan demikian mencegah mereka mendapatkan kembali kendali atas proses politik. Sehingga pengelolaan politik dualitas nilai dan fakta disebut paradigma ini. Birokrasi, bukan legislatif atau yudikatif, adalah inti dari paradigma ini.

***Paradigma 2: The Principles of Administration (1927-1937)***

Prinsip administrasi Willoughby menggambarkan bahwa administrasi adalah prinsip yang berbeda dari bentuk pemerintahan lainnya. Selain itu, Taylor menganjurkan penggunaan administrasi administrasi dalam buku "Prinsip Manajemen Ilmiah." Gullick dan Urwick kemudian mempresentasikan fungsi manajemen POSDCORB, serangkaian pendekatan untuk memahami fungsi manajemen ini (perencanaan, organisasi, kepegawaian, bimbingan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran). Dalam artikel ini, kita akan berbicara tentang beberapa praktik manajerial terbaru.



### ***Paradigma 3: Public Administration as Political Science (1950-1970)***

Banyak pandangan politik dan profesional berusaha untuk mendefinisikan kembali lintasan administrasi publik, yang disebut birokrasi pemerintah, dalam paradigma ketiga ini. Kajian administrasi publik telah dimasukkan ke dalam kajian ilmu politik, sehingga menimbulkan kritik tajam terhadap ilmu administrasi sebagai ilmu yang selama ini berjalan pada paradigma kedua karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. "Tipe PA" dan "tipe PSA" pertama kali diciptakan selama periode ini, ketika ada lebih banyak studi empiris tentang administrasi publik, tetapi gagasan politik yang kuat dikembangkan. PA (Administrasi Publik) diakui sebagai warga negara kelas dua dalam profesinya sendiri di antara berbagai jenis organisasi.

### ***Paradigma 4: Public Administration as Management (1956-1970)***

Adiknya, ilmu manajemen, yang membantu paradigma keempat ini, ilmu administrasi publik, karena dulu ilmu administrasi publik diabaikan. The "*Public Administration Review*" yang diterbitkan oleh American Institute of Public Administration dan bagian lain di majalah terkemuka lainnya mulai menawarkan konsep baru di Amerika Serikat.

Untuk mulai dengan, menyajikan berbagai ilmu manajemen dalam administrasi publik, seperti strategi manajemen kepemimpinan; insentif; komunikasi; sistem Informasi Manajemen; penganggaran; audit; pemasaran; dan seterusnya. Ini merupakan perkembangan yang relatif baru di bidang politik dan administrasi.

### ***Paradigma 5: Public Administration as Public Administration (1970an)***

Administrasi publik adalah ilmu yang menggabungkan beberapa pengertian yang berbeda, menurut Nicholas Henry (1975) dalam *Journal of Public Administration Review*, yang menulis paradigma terakhir. Di Amerika Serikat, dimulai dengan menciptakan banyak

program pascasarjana di bidang administrasi publik. Seperti Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro (1977) mengamati dalam "*Administrasi Publik Modern*" akademisi ilmu administrasi publik telah menciptakan berbagai pendapat. Upaya kelompok koperasi dalam administrasi urusan publik.

1. Terdiri dari tiga divisi, yang masing-masing membahas aspek khusus dari hubungan pemerintah-legislatif-yudisial: (tanpa pemisahan);
2. Membantu dalam pengembangan kebijakan. Karena administrasi publik adalah bagian dari proses politik;
3. Ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan sektor publik dan swasta dalam hal administrasi. Nirlaba lebih mementingkan menghasilkan uang daripada melayani kepentingan publik;
4. Administrasi publik memberikan pelayanan kepada publik. Inilah sebabnya mengapa administrasi publik modern saat ini selalu dikaitkan dengan: (a) tiga departemen pemerintah yang bekerja sama untuk (3) membuat kebijakan; (b) proses politik; dan (c) pelayanan publik..

### ***Paradigma 6: Publics Administration and Publics Affair***

Pada tahun 1990-an, sebuah paradigma baru lahir. Perubahan konsep pemerintahan dan administrasi telah dikategorikan ke dalam tiga kelompok yang berbeda dalam paradigma ini:

- a. Globalisasi; Ketika datang ke perdagangan internasional dan merger perusahaan multinasional serta masalah lingkungan global, ini adalah masalah yang kompleks.
- b. Redefinisi; Reposisi pemerintah adalah contoh nyata dari hal ini. Kekuasaan dan hierarki diganti dengan kerjasama dan kemitraan dalam struktur pemerintahan.

- c. Devolusi; termasuk keterlibatan warga negara dalam kemitraan publik-swasta, sektor nirlaba dan organisasi pemerintah lainnya serta otoritas publik sektor swasta.

Selama paradigma ini, administrasi publik beralih dari mengendalikan warga, upaya penyediaan kebijakan publik, hukum organisasi dan lembaga yang dikendalikan oleh warga, perbedaan kelembagaan antara pemerintah, masyarakat swasta dan sektor nirlaba mulai kabur. Pemerintah dewasa ini sedang merestrukturisasi organisasi dengan penggunaan teknologi informasi.

Penulis makalah ini menggunakan paradigma kelima, yaitu administrasi negara adalah administrasi negara, 1970, sebagai dasar analisisnya. Sikap dan fokus paradigma ini sangat jelas. Teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik adalah mata pelajaran utama administrasi publik.

### **1.5.3 Kebijakan Publik**

Ada hubungan yang kuat antara frase kebijakan publik atau kebijakan publik dan kata-kata seperti publik, publik, umum, dan kebijakan atau kebijaksanaan. Menurut James E. Anderson, yang dikutip oleh Solichin Wahab (2005: 2), pembuatan kebijakan berkaitan dengan kebijaksanaan, yaitu perilaku banyak aktor (pejabat, kelompok, lembaga pemerintah, dll.) di sektor-sektor khusus.

Yang dimaksud oleh Inu Kencana Syafie (2006:106) sebagai kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang saling terkait yang diambil oleh badan atau pejabat pemerintah di bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan fungsi pemerintahan (seperti pertahanan, keamanan, energi, dan kesehatan). Pilihan berikut tersedia: pendidikan, kesejahteraan masyarakat. “Kebijakan publik” adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, kata Lijan P. Sinambela (2008:15).

Pikiran rakyat atau pemerintah diwujudkan dalam tindakan oleh setiap pelaksana untuk memastikan bahwa harapan dan gagasan pembuat kebijakan terpenuhi dan tujuan tercapai. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mengutamakan tujuan kebijakan daripada kepentingan pembuat keputusan itu sendiri. Kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan pemerintahan akan menjadi sia-sia.

Terbentuknya fenomena di antara para pemangku kepentingan, yaitu kesan bahwa suatu fenomena memang merupakan isu, diikuti dengan konstruksi batasan masalah dalam perumusan agenda kebijakan. Untuk meminimalkan sejumlah masalah dalam agenda kebijakan yang harus ditangani dan memiliki urgensi tinggi, langkah terakhir dalam proses pembuatan agenda adalah menggalang dukungan publik untuk mencari solusi. Mengatur kelompok sosial, kekuatan politik, publikasi media massa, dll untuk menjadikannya bagian dari agenda pemerintah.

Selanjutnya, menurut Isworo (2002:69), proses kebijakan publik terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sebelum membuat permintaan untuk resolusi, penting untuk mengetahui apa masalahnya.;
2. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan dalam menanggapi pemilihan alternatif;
3. Legitimasi dari adanya sebuah pengaturan;
4. Pelaksanaan;
5. Upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan harus dinilai melalui berbagai metode.

#### **1.5.4 Implementasi Kebijakan**

Eksekusi kebijakan publik merupakan langkah penting dalam proses tersebut. Efek atau hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan tidak dapat dicapai kecuali jika diterapkan. Ada berbagai model implementasi, termasuk model implementasi kebijakan.

Sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, menurut para ahli. Para ahli di Nugroho telah menemukan model implementasi berikut (2014:666-667):

##### ***1. Model Mazmanian dan Sabatier.***

Kerangka kerja untuk menerapkan model analitis adalah apa yang kami sebut model ini. Tiga variabel yang membentuk proses implementasi kebijakan diuraikan di bawah ini. Pengendalian masalah dapat ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk kompleksitas masalah, keragaman komponennya, dan berapa banyak pekerjaan yang diperlukan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan. Kedua, variabel intervensi, atau kemampuan kebijakan untuk menciptakan proses implementasi dengan tanda-tanda yang jelas dan konsisten. Terakhir, variabel dependen adalah lima tahap pengembangan dan implementasi dalam lima tahap proses implementasi, dimulai dengan pemahaman badan pelaksana. kebijakan tersebut, diikuti dengan kesesuaian objek terhadap kebijakan tersebut, hasil nyata yang dapat dilihat dan diterima, dan revisi akhir. Kebijakan atau kerangka kebijakan yang lengkap.

##### ***2. Model Edward.***

Subarsono (2008: 90-92) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan difokuskan pada empat isu utama: komunikasi, sumber daya, pembuangan, dan struktur birokrasi.

##### ***3. Model Van Meter dan Van Horn.***

Implementasi kebijakan didefinisikan oleh Van Mitte dan Van Horn sebagai langkah-langkah yang diambil oleh individu atau kelompok pemerintah atau pejabat swasta untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dari pilihan kebijakan. Hubungan linier antara

implementasi kebijakan, kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan diasumsikan dalam perspektif kedua. Menurut Meter dan Horn, hubungan antara kebijakan dan kinerja dapat dijelaskan oleh enam elemen. Tergantung pada model ini adalah sejauh mana standar dan tujuan kebijakan terpenuhi, dan ini ditandai sebagai sejauh mana kinerja dicapai. Van Meter dan Horn dalam Subarsono (2008: 99-101) mengidentifikasi enam variabel yang berdampak pada keberhasilan suatu implementasi, antara lain:

#### 1. Standar dan sasaran kebijakan

Ketika ukuran kebijakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, keberhasilan, skala, dan tujuan kebijakan didasarkan pada seberapa baik kebijakan tersebut benar-benar diimplementasikan. Akan sulit untuk menerapkan kebijakan jika tujuan dan metriknya terlalu sempurna. Norma dan tujuan kebijakan harus dipahami dengan baik. Agar kebijakan dapat diimplementasikan, mereka perlu diimplementasikan oleh orang-orang yang memahami standar dan tujuan.

Sikap pelaksana terkait erat dengan standar dan tujuan kebijakan. Faktor "penting" lainnya adalah sikap pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan (kecenderungan). Mungkin ada masalah dengan penerapan kebijakan jika pelaksana menolak untuk menerapkannya atau tidak memahami apa tujuan kebijakan itu.

#### 2. Sumberdaya

Sangat penting bahwa setiap langkah eksekusi didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan amanat politik. Untuk menerapkan kebijakan secara efektif, sangat penting untuk memiliki orang yang tepat di lapangan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sangat bergantung pada

kemampuan untuk memanfaatkan secara efektif sumber daya yang ada, terutama yang melibatkan masyarakat. Sumber daya keuangan dan waktu juga penting untuk efektivitas implementasi kebijakan, selain sumber daya manusia. Komunikasi sama pentingnya dengan sumber daya kebijakan.

### 3. Hubungan antar organisasi

Memperbaiki organisasi dimaksudkan untuk berfungsi sebagai kelompok formal dan informal yang akan membantu mengimplementasikan kebijakan. Agar implementasi strategi berhasil, sangat penting bahwa agen implementasi memiliki fitur yang tepat. Beberapa pelaksana kebijakan yang keras dan disiplin akan menuntut latar belakang kebijakan yang tegas dan disiplin untuk mengimplementasikan banyak kebijakan. Beberapa situasi memerlukan penggunaan eksekutif yang lebih demokratis dan meyakinkan. Selain itu, cakupan atau area di mana suatu kebijakan diimplementasikan merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan.

Dua faktor yang membedakan organisasi implementasi. Organisasi birokrasi dalam situasi ini ditandai dengan Standard Operasional Procedure (SOP) dan fragmentasi (Edward III, 1980).

### 4. Karakteristik agen pelaksana

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif, Van Meter dan Van Hort berpendapat, pelaksana perlu mengetahui apa kriteria targetnya. Standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada pelaksana oleh mereka yang akan bertanggung jawab untuk mencapainya. Komunikasi harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi untuk memberikan para pelaksana kebijakan pengetahuan tentang standar dan tujuan.

### 5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Menurut pendapat Van Meter dan Van Hornt: Sikap implementasi kebijakan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap berhasil atau tidaknya kebijakan publik diimplementasikan. Karena kenyataan bahwa penduduk setempat mengetahui masalah ini dan telah menyatakan keprihatinan mereka, kemungkinan besar kebijakan ini akan diadopsi tanpa masukan mereka. Pengambil keputusan mungkin tidak menyadari atau bahkan tidak dapat mengetahui kebutuhan, keinginan, atau masalah yang harus ditangani dalam pembuatan kebijakan publik.

#### 6. Disposisi implementor.

Hal terakhir ialah penting untuk memeriksa seberapa baik kebijakan publik diimplementasikan ketika mengevaluasi kinerja implementasi. Kegagalan implementasi kebijakan mungkin disebabkan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang merugikan. Akibatnya, lingkungan eksternal yang menguntungkan diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.

Menurut pendapat Van Meter dan Van Hornt: Sikap Penerimaan atau penolakan subyek implementasi kebijakan terhadap kebijakan akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalannya. Mereka kemungkinan besar akan mengejar rencana yang tidak memiliki masukan dari orang-orang lokal yang berpengalaman dalam masalah ini dan banyak aspeknya. Pembuat kebijakan mungkin tidak mengetahui atau bahkan dapat menjangkau keinginan, keinginan, dan masalah masyarakat karena kebijakan publik sebagian besar bersifat top-down.

Perspektif mereka tentang kebijakan dan dampak kebijakan pada kepentingan pribadi dan organisasi mereka akan mempengaruhi sentimen mereka. Derajat implementasi kebijakan yang dilihat oleh pelaksana merupakan filter pertama bagi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh tiga faktor: pertama, pemahaman (kognisi), pemahaman dan pendalaman (pemahaman



dan pemahaman) kebijakan. Kedua, arah tanggapan mereka adalah penerimaan, atau netralitas atau penolakan (penerimaan, netralitas, dan penolakan).

Tujuan standar dan tujuan kebijakan harus dipahami dengan baik. Dalam hal implementasi kebijakan, kurangnya pemahaman tentang kriteria dan tujuan kebijakan dapat menyebabkan kegagalan (frustrasi). Arah di mana standar dan tujuan kebijakan akan dilaksanakan. Arah penerapan standar dan tujuan kebijakan juga merupakan masalah "penting". Ada kemungkinan pelaksana kebijakan tidak dapat menjalankan tugasnya karena menolak tujuan kebijakan.

Namun, ada kemungkinan bahwa orang yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan akan memiliki dukungan yang luas dan mendalam terhadap norma dan tujuan kebijakan. Intensitas pelaksana (eksekutif) pada akhirnya akan mempengaruhi pelaksana kebijakan (kinerja). Kegagalan pelaksanaan kebijakan mungkin disebabkan oleh kurangnya atau terbatasnya intensitas dalam jenis pelepasan ini..

#### **4. Model Grindle.**

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi: (1) Kepentingan terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*), (2) Manfaat yang dihasilkan (*type of benefit*), (3) Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), (4) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*), (5) Para pelaksana program (*program implementators*), (6) Sumber daya yang dikerahkan (*Resources committed*). Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud: (1) Kekuasaan (*power*), (2) Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*), (3) Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*), (4) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

5. *Model Brian W.Hogwood & Lewis A. Gunn.* Meliputi: (1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius, (2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai, (3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal, (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, (6) Hubungan saling ketergantungan harus sedikit, (7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, (8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, (9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Karena penelitian multi-partisipatif penulis di sini, Mitte dan Van Horn. Komunikasi organisasi, skala dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana serta implementasi kinerja implementasi konfigurasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik adalah semua faktor yang menurut teori penulis mempengaruhi kebijakan implementasi dan tujuan kebijakan/masyarakat. Teori Van Meter dan Van Horn terkait dengan penggunaan.

### **1.5.5 Peran**

Soerjono Soekanto (2002:243) berpendapat bahwa peran adalah bagian dinamis dari status yang harus dipahami. Fungsi seseorang terpenuhi jika ia melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatannya. Konsep peran seseorang dalam masyarakat disebut sebagai peran. Dimungkinkan juga untuk menganggap peran sebagai tindakan individu yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat.

Menurut Soejono Soekamto yang dikutip oleh Mursyid Itsnaini dalam skripsinya yang berjudul "Pemberdayaan Anak Jalanan oleh Rumah Singgah Kawah di Kelurahan Klitren, Gundokusuman Yogyakarta". Bagian-bagian atau peran-peran penyusun peran adalah sebagai berikut:

- a. Untuk satu hal, lokasi memiliki kualitas dinamis untuk itu;
- b. Hak dan kewajiban peralatan;
- c. Perilaku sosial karyawan dalam posisinya;
- d. Kinerja peran untuk orang lain.

Oleh karena itu, bermain peran adalah kekuatan pendorong di balik tindakan yang dihasilkan. Hanya dengan memahami ekspektasi satu sama lain dan menyelaraskan ekspektasi tersebut dengan ekspektasi Anda sendiri, Anda dapat melakukan percakapan. Tujuan utama dari pengembang komunitas adalah untuk membantu anggota komunitas membangun keterampilan organisasi dan pengambilan keputusan mereka sendiri sehingga mereka dapat memperbaiki kehidupan mereka sendiri (bisnis). Tujuan dari pengembangan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat percaya pada diri mereka sendiri dan kekuatan mereka.

Menurut Ife yang disebut oleh Isbandi Rukminto Adi, setidaknya ada empat tanggung jawab dan keterampilan utama yang harus dimiliki para pekerja komunitas untuk memberdayakan komunitasnya. Peran dan kemampuan ini akan dibahas secara lebih rinci di bawah ini. Keempat peran dan bakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran dan keterampilan fasilitatif.

Peran fasilitatif merupakan peran khusus seperti melakukan animasi sosial, mediasi, dan negosiasi, pemberi dukungan, membentuk konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan sumber daya dan keterampilan dan mengorganisasi. Berbagai tanggung jawab tersedia bagi mereka yang ingin berperan aktif dalam kemajuan masyarakat.

2. Peran dan keterampilan edukasional.

Kesadaran publik, menyampaikan informasi, mengonfrontasikan tugas dan pelatihan adalah bagian dari peran edukasional.

### 3. Peran dan keterampilan perwakilan.

Fungsi ini digunakan oleh pengembang komunitas saat berinteraksi dengan agensi pihak luar atas nama masyarakat atau kelompok. Sebagai juru bicara suatu komunitas, Pendamping akan bertanggung jawab untuk mendapatkan sumber daya, melakukan hubungan masyarakat atau pembelaan komunitas, membentuk kemitraan atau jaringan, dan berbagi pengalaman dan wawasan pendamping itu sendiri.

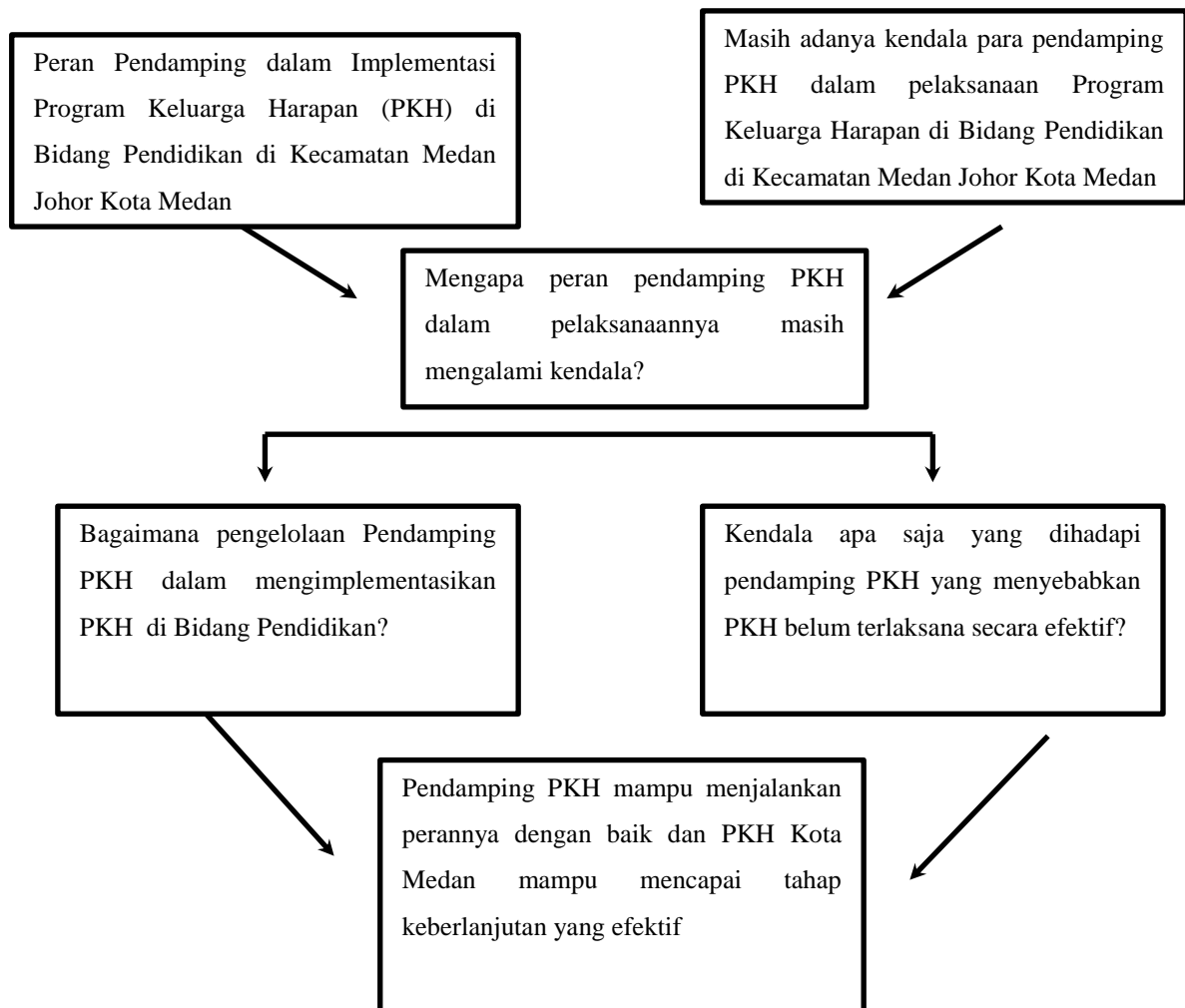
### 4. Peran keterampilan teknis

Tujuan dari posisi ini adalah untuk menumbuhkembangkan peran masyarakat sebagai community developer dengan memanfaatkan talenta teknis. Keahlian dalam pengumpulan dan analisis data; penggunaan komputer; laporan lisan dan tertulis; pembangunan infrastruktur fisik; pelaporan; mengelola dan mengendalikan keuangan semua memerlukan keahlian tingkat tinggi.

Isbandi Rukminto Adi mengutip teori peran Ife sebagai landasan hipotesisnya dalam penelitian ini. Sebagian besar aktivitas sehari-hari, menurut teori peran, termasuk dalam satu atau lebih kategori ini (seperti ibu, manajer, guru). Hak, kewajiban, harapan, konvensi, dan perilaku melekat pada setiap fungsi sosial yang diemban seseorang. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh status sosial dan faktor lain dengan cara yang dapat diprediksi, menurut asumsi model.

## **1.5.6 Kerangka Pemikiran**

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berfikir Penelitian**



*Sumber:diolah oleh Peneliti (2021)*

## 1.6 Operasionalisasi Konsep

### 1.6.1 Peran Pendamping PKH

Dalam hal keamanan, PKH adalah model yang menggunakan bantuan sosial untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan hidup, seperti pendidikan dan kesehatan, tersedia tanpa biaya tambahan. Namun, PKH memiliki kehalusan pemberdayaan, artinya keluarga miskin dapat keluar dari kemiskinan dan mendorong anaknya bersekolah melalui promosi kesehatan.

Mengikuti definisi LFE tentang pekerja masyarakat, peran fasilitator PKH dapat diringkas sebagai berikut:

1. Peran dan Keterampilan Fasilitatif

Keterlibatan promotor lebih besar dari pada penerima PKH, namun promotor PKH hanya menawarkan layanan terbatas di area ini. Tugas fasilitator sebagai animator adalah menginspirasi dan memotivasi keluarga menjadi penerima PKH dan menjalankan kewajibannya, seperti memeriksakan pelayanan kesehatan ibu hamil/ibu nifas dan balita, serta menyekolahkan anaknya. Manfaat PKH tidak memenuhi persyaratan PKH.

2. Peran dan Keterampilan Edukasional

Terlepas dari upaya para promotor PKH dan kemampuan mengajar mereka, para penerima manfaat PKH masih memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang program tersebut. Namun, masih banyak penerima PKH yang tidak dapat menjelaskan dengan jelas atau mudah apa itu PKH. Tidak ada tanggung jawab dari pihak PKH untuk memberikan bantuan tunai kepada mereka yang memenuhi syarat untuk program pemerintah bagi yang membutuhkan.

3. Peran dan Keterampilan Perwakilan

Komunikasi dan pengumpulan informasi adalah tugas utama seorang wakil, yang juga bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi ke dan dari penerima PKH, dan sebaliknya. Ada kemungkinan UPPKH Kabupaten akan menyesuaikan besaran bantuan tunai yang diberikan kepada penerima PKH berdasarkan informasi yang diberikan oleh penerima bantuan tersebut kepada UPPKH Kabupaten. Perpindahan pendidikan dari SD ke SMP, misalnya, bisa mengakibatkan wanita yang tidak pernah hamil menjadi hamil. Sebaliknya, jadwal pembayaran untuk dukungan moneter yang disediakan oleh asisten informasi, volume. 16 02 Tahun 2011 113 PKH, telah dikeluarkan oleh kabupaten. Koordinator PKH menggunakan media kelompok, khususnya peran ketua kelompok

penerima manfaat, untuk menghubungkan pertukaran informasi karena keterbatasan waktu.

#### 4. Peran dan Keterampilan Teknis

Penelitian, penggunaan komputer, penulisan, dan presentasi lisan dan tertulis adalah beberapa bakat yang dibutuhkan untuk posisi teknis ini. Sejauh menyangkut rencana, posisi dan kemampuan ini terkait erat dengan tugas-tugas administrasi rencana. Meskipun posisi dan kemampuan teknis ini tidak secara langsung berdampak pada klien PKH, mereka sering memainkan peran kunci di antara fasilitator PKH. Alasan untuk fokus pada keberhasilan administrasi proyek PKH karena umumnya digunakan sebagai penunjuk keberhasilan.

#### **1.6.2 Fenomena Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan**

PKH bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah, khususnya di kalangan anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah (RTSM), dan untuk mencegah pekerja anak di Indonesia melalui program pendidikannya. Dengan mendorong RTSM untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan untuk memastikan bahwa setidaknya 85 persen dari hari sekolah efektif dalam sebulan telah dihadiri, PKH Pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan ini.

Sementara lulusan SD dan SMP RT di Medan Johor dinilai masih memiliki tingkat pendidikan rata-rata, lulusan SMA/MA/SMK dan sarjana juga hadir. Ketiadaan pendidikan formal mengakibatkan kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya anaknya mengenyam pendidikan tinggi. Keadaan ekonomi yang menyebabkan anak di bawah umur bekerja, seperti bermigrasi dan bekerja di daerah pedesaan, juga merupakan peran utama. Meski baru SD, bantulah orang tuamu menjadi petani.

Anak-anak mungkin putus sekolah karena berbagai alasan, termasuk kurangnya dukungan di rumah. Tidak jarang anak-anak melakukan perilaku tidak menyenangkan dengan teman-temannya, misalnya (minum, bermain game online, bertengkar, dll).

Ibu hamil (ibu hamil), ibu nifas (ibu nifas), balita (anak balita), dan ibu prasekolah (ibu prasekolah, anak dari rumah tangga sangat miskin (KSM) (Apras) semuanya merupakan penerima bantuan PKH. PKH bertujuan untuk meningkatkan jumlah siswa yang bersekolah, khususnya yang berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah (KSM), agar tidak putus sekolah. Akibatnya, pemanfaatan dana yang dialokasikan untuk peserta PKH di Desa Kwala Bekala Medan Johor di Medan, Johor berbeda dengan peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Beberapa peserta menggunakan bantuannya untuk membeli makanan, perlengkapan sekolah (seperti sepatu dan tas sekolah), beternak kambing, unggas dan langsung digunakan sebagai dana simpanan. Namun bantuan PKH juga dimanfaatkan oleh beberapa keluarga untuk meningkatkan taraf hidup mereka, seperti melunasi hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pengenalan ibunda Anna.

*“Uang yang saya terima dari pencairan PKH buat bayar hutang, terus untuk biaya anak sekolah setiap hari, biaya berobat Saya dan Keluarga, dan buat kebutuhan dapur mklum mbak pengeluaran besar dan tidak cukup dari bantuan PKH saja”.*

Berdasarkan Fenomena tersebut, beberapa Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti membeli perlengkapan sekolah dan lainnya akibat bantuan subsidi PKH hanya cukup untuk membayar uang sekolah saja.

Berikut ialah tabel Fenomena dan Indikasi Peran Pendamping PKH Kota Medan :



Tabel 1.3

## Fenomena dan Indikasi

<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Fenomena</b>	<b>Indikasi yang Diamati</b>
Tujuan 1: Identifikasi Pendamping	Implementasi Kebijakan PKH Menurut Van Meter dan Hornt	1. Implementasi berdasarkan teori Van Meter dan Hornt yaitu dilihat dari Standar dan tujuan, sumber daya, interaksi antar organisasi, karakteristik lembaga pelaksana dan kondisi sosial ekonomi dan politik adalah semua faktor yang mempengaruhi kebijakan. Dan kepribadian orang yang akan melaksanakannya. 2. Persiapan Pendamping dilihat dari Pola interaksi, Harapan tentang peran ( <i>expectation</i> ) dan Perwujudan perilkudalam peran ( <i>performance</i> ) 3. Peran Pendamping menurut Ife yaitu dari Peran Fasilitatif, Edukasional, Keterampilan Perwakilan dan Teknis.
	Persiapan Pendamping	
	Peran Pendamping Menurut Ife	
<b>Tujuan 2:</b> <b>Faktor</b>	Faktor Internal	Pendamping mungkin mengalami kesulitan mengumpulkan file data

<b>Penghambat</b>		atau memperbarui formulir sebagai penghalang internal untuk instruksi.
	Faktor Eksternal	Informasi mendadak dari pusat merupakan komponen eksternal yang menyebabkan hasil yang tidak memuaskan.

Sumber: Diolah Penulis

**Tabel 1.4**  
**Peran Pendamping PKH Menurut Ife dan Kenyataan Lapangan**

NO.	Konsep Ideal Peran Pendamping	Peran Pendamping	
		Terjadi	Tidak Terjadi
1.	<i>Fassilitative roles</i>		
	• Animasi sosial		
	• Mediasi dan Negosiasi		
	• Pemberi dukungan		
	• Membentuk konsensus		
	• Fasilitasi kelompok		
	• Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan		
	• Mengorganisasi		
2.	<i>Educational roles</i>		
	• Membangkitkan kesadaran masyarakat		
	• Menyampaikan informasi		
	• Mengonfrontasikan		
	• Pelatihan		
3.	<i>Representational roles</i>		

	● Mencari sumber daya		
	● Advokasi		
	● Memanfaatkan media		
	● Hubungan masyarakat		
	● Mengembangkan jaringan		
	● Membagi pengetahuan dan pengalaman		
4.	<i>Technical roles</i>		
	● Keterampilan untuk melakukan riset		
	● Menggunakan komputer		
	● Melakukan presentasi tertulis maupun verbal		
	● Kemampuan untuk mengontrol dan mengelola keuangan		

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian deskriptif dengan prosedur kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sujarweni (2014: 19) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses yang menghasilkan data deskriptif dan perilaku pengamat dalam ucapan atau tulisan. Orang, kelompok, komunitas, dan organisasi dalam konteks tertentu diharuskan untuk dideskripsikan dengan sangat rinci menggunakan metodologi kualitatif, dan peneliti diharapkan untuk melakukan pekerjaannya dari perspektif yang menyeluruh, komprehensif, dan holistik. pendapat. Dengan menggunakan bentuk penelitian ini, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi pendamping Program Keluarga Harapan Medan Johor dalam melaksanakan program tersebut.

### 1.7.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian digunakan sebagai kriteria untuk penyelidikan masa depan. Penelitian ini berfokus pada fungsi fasilitator dalam pelaksanaan

Program Keluarga Harapan di bidang pendidikan Medan Johor. Penawaran melalui indikator peran stakeholders dan implementasi kebijakan yakni indikator sumberdaya , komunikasi antar organisasi yang difokuskan pada identifikasi analisis peran pendamping dalam program keluarga harapan di bidang pendidikan sebagai bagian dari domain perubahan yang terkait dengan tujuan PKH, yaitu pelaksanaan PKH di bidang pendidikan, tentang bagaimana peran pendamping PKH terhadap kelompok penerima manfaat dari adanya Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Johor sudah menjalankan pendidikan sesuai dengan syarat dari Program Keluarga Harapan (PKH).

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pertanyaan penelitian atau partisipan dalam topik penelitian disebut peneliti. Untuk lebih memahami peran koordinator dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Dinas Pendidikan Medan Johor, maka dipilihlah tema-tema tersebut. Penelitian ini berfokus pada hal-hal berikut:

1. Pihak Dinas Sosial Kota Medan di bidang Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Medan
2. Koordinator Kota Program Keluarga Harapan Kota Medan
3. Pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Johor.
4. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH kategori yang memiliki anak sekolah di Kecamatan Medan Johor.

### **1.7.4 Lokasi Penelitian**

Dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2014: 86) menyarankan untuk melihat teori substantif, turun ke lapangan, dan mencari spot yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Waktu, uang, tenaga, dan tenaga juga harus diperhitungkan. Dalam memilih lokasi penelitian. Dalam penelitian ini berada di Kecamatan Medan Johor. Pemilihan lokasi ini dikarenakan

Kecamatan Medan Johor memiliki banyak jumlah Keluarga Sangat Miskin (KSM) di usia anak sekolah sehingga tertarik untuk melihat sejauh mana Peran Pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi masalah di bidang pendidikan di kecamatan tersebut.

### **1.7.5 Jenis Data dan Sumber Data**

Ini semua tentang teks dan data tindakan. Sumber utama data penelitian adalah sumber data. Dalam Sujarweni (2014: 74-75), data dipecah menjadi tiga kategori:

#### **a. Data Primer**

Peneliti dan staf nara sumber saling mewawancarai untuk memperoleh data dari responden dengan menggunakan kuesioner, kelompok fokus, dan kelompok kecil. Penelitian ini lebih banyak mengandalkan observasi langsung dan wawancara dengan narasumber terkait peran pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Dinas Pendidikan Medan Johor.

#### **b. Data Sekunder**

Laporan keuangan seperti makalah perusahaan, laporan pemerintah, esai, buku teori, dan jurnal, serta data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Data tambahan ini tidak memerlukan pemrosesan tambahan.

### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Berbagai strategi pengumpulan data digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, dan teknik-teknik ini diterapkan berulang kali hingga datanya jenuh. Peneliti menggunakan pendekatan berikut untuk mengumpulkan data:

#### **1. Metode Observasi**

Sugiyono (2016:224) menunjukkan bahwa peneliti dapat melihat hal-hal yang tidak atau belum diamati orang lain, terutama hal-hal yang dianggap “umum” dan karenanya tidak akan dilaporkan dalam wawancara. Seseorang juga dapat memperoleh perasaan pribadi dan merasakan suasana lingkungan sosial yang diselidiki melalui pengamatan. Program Keluarga Harapan sedang dilaksanakan di dinas pendidikan kabupaten di Medan Johor ketika pengamat studi melakukan kerja lapangan di kabupaten Medan Johor.

Observasi yang dilakukan yaitu melihat kondisi fisik di Kecamatan Medan Johor, memperhatikan lingkungan di Kecamatan Medan Johor, sanitasi, kondisi rumah, dan sekolah di Kecamatan Medan Johor.

## 2. Metode Wawancara

Secara sederhana Esterberg dalam Sugiyono (2016:231) menyatakan bahwa wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk membahas suatu masalah tertentu melalui tanya jawab. Selama penelitian, peneliti mewawancarai setiap orang yang memiliki andil dalam menyusun dan melaksanakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Johor.

## 3. Metode Dokumentasi

Dokumen tersebut, menurut Sugiyono (2016: 240), merupakan catatan masa lalu. Ada banyak jenis dokumen, seperti kata-kata tertulis, foto, dan artefak. Singkatnya, metode pengumpulan data dokumen adalah mengekstrak data dari dokumen itu sendiri.

Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian Peran Pendamping dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Bidang Pendidikan di Kecamatan Medan Johor ialah berupa gambar yang diambil di lokasi penelitian.

### **1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Sebagai bagian dari analisis dan interpretasi data, penelitian ini mengandalkan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari Miles dan Huberman Huberman (dalam Sugiyono 2015: 246).

Ada beberapa kegiatan analisis data yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman Sugiyono (2016, 246):

#### **1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Sebuah aspek penting dari proses penelitian adalah perolehan data Observasi, wawancara, dan tinjauan literatur semuanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Oleh karena itu, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang inovasi yang dimulai dari perencanaan dan implementasi melalui observasi, wawancara, dan studi literatur..

#### **2. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data adalah proses menyimpulkan, memilih informasi yang paling relevan, memfokuskan pada aspek yang paling signifikan, dan mencari pola dan tema. Hasilnya, peneliti akan dapat melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan pencarian lebih cepat dan mudah jika diperlukan.

#### **3. Teknik Most Significant Change (MSC)**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik MSC sebagai teknik analisis data. Tujuannya adalah untuk melihat perubahan-perubahan apa yang nampak setelah pelaksanaan program kepada penerima manfaat sebagai sebuah wujud pencapaian program.

#### **4. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penjelasan singkat, grafik, keterkaitan antar kategori, dan diagram alur merupakan contoh penyajian data dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Medan Johor, dijelaskan fungsi tutor dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

#### 5. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Ini adalah penemuan baru yang inovatif yang dimungkinkan oleh penelitian kualitatif. Deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya dikaburkan atau dikaburkan dapat muncul sebagai hasil penelitian. Investigasi Program Keluarga Harapan di Dinas Pendidikan Medan Johor telah menarik kesimpulan berdasarkan wawancara, observasi, dan teks naratif tentang peran asisten dalam pelaksanaannya.

#### **1.7.8 Kualitas Data**

Kualitas atau validitas data adalah yang menentukan kredibilitas data tersebut. "Triangulasi" adalah metode kualitas data yang digunakan dalam penyelidikan ini. Pengecekan kebenaran data dapat dilakukan dengan triangulasi, menurut Moleong (2014: 330). Ini memeriksa atau membandingkan data dengan item selain data. Denam (2014: 330) mengatakan bahwa di Moleong, ada empat jenis triangulasi yang berbeda:

1. Triangulasi Sumber, yaitu menggunakan berbagai sumber data
2. Triangulasi Penyidik, yaitu melibatkan berbagai peneliti yang berbeda latar belakangnya.
3. Triangulasi Teori, yaitu menggunakan perspektif yang berbeda untuk menginterpretasikan serangkaian data yang terkumpul
4. Triangulasi Metode, yaitu penggunaan berbagai metode untuk mempelajari suatu persoalan

Model triangulasi data akan digunakan oleh peneliti berdasarkan beberapa model triangulasi yang ada. Menurut triangulasi data, adalah mungkin untuk menyelidiki suatu topik



dengan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan banyak orang yang memiliki sudut pandang yang beragam. Namun, masing-masing metodologi ini menghasilkan bukti atau data unik, yang pada gilirannya memberikan wawasan unik ke dalam subjek yang diselidiki. Akan ada berbagai perspektif dari mana kebenaran yang dapat diandalkan dapat ditarik.

Patton dalam Moleong (2014: 330-331) mendefinisikan triangulasi sumber sebagai perbandingan dan verifikasi keterpercayaan informasi yang dikumpulkan melalui berbagai waktu dan alat. Dapat dilakukan dengan cara:

1. Data observasi dan wawancara harus dibandingkan.
2. Pikiran orang-orang tentang situasi penelitian harus dibandingkan dengan apa yang telah mereka nyatakan.
3. Bandingkan pandangan orang-orang dengan berbagai tingkat pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan.
4. Analisis temuan wawancara dengan mempertimbangkan dokumentasi yang relevan